



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan guna menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta sanggup menjawab tuntutan transformasi secara efisien serta efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Bappelitbangda sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah tentunya wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang didalamnya memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2024.

Semoga dengan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dari berbagai pihak guna penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan.

Walaikum salam, WR, WB

Benteng, 23 Januari 2024
KEPALA BAPPELITBANGDA



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19840104 200903 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum OPD.....	1
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	7
1.5. Inovasi.....	9
1.6. Penghargaan.....	10
1.7. Realisasi Keuangan.....	11
BAB.II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	12
2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	12
2.1.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan).....	13
2.1.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan).....	13
2.1.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan partisipasi publik).....	13
2.2. Capaian Kinerja Indikator Komponen Otonomi Daerah.....	14
BAB.III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	16
3.1. Dasar Hukum.....	16
3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	16
3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	16
3.4. Hambatan – Hambatan.....	16
BAB.IV. PENUTUP.....	17
Lampiran.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023	8
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2023.....	8
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tahun 2023.....	9
Tabel 1.4. Target Belanja Bappelitbangda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023	10
Tabel 2.1. IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	12
Tabel 2.2. Instrumen data tambahan EPPD Tahun 2023.....	14
Tabel 2.3. Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024	14
Tabel 3.1. Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kepulauan Selayar.....	3
Gambar 1.2 Tampilan Website e-monev.com	9

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran. LPPD ialah salah satu laporan yang disusun serta di informasikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, segala informasi serta data yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun bersumber pada prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi serta objektif.

I.2. Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Organisasi Perangkat Daerah bertipe A yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satunya adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Kode Pos 92812, website : <https://bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id/> Email : kepeg.bappedasly@gmail.com dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y 120.466638.

I.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

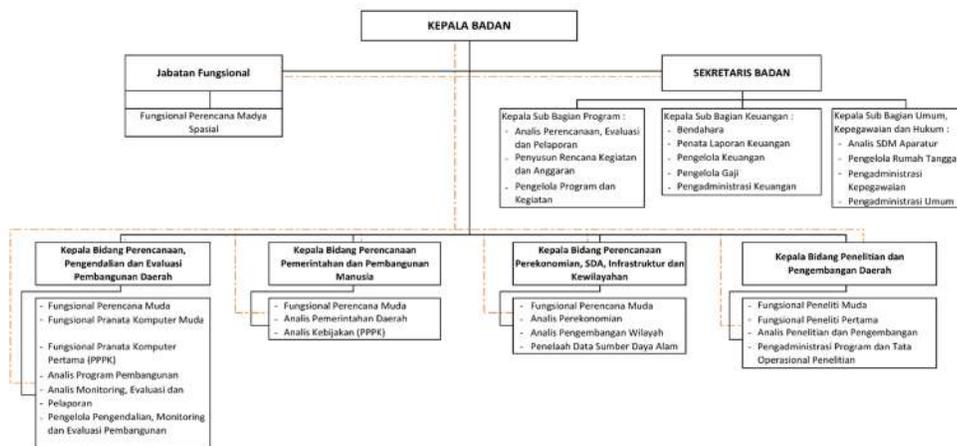
- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli; dan
 - b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar



Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 4 Tahun 2022

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappelitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional lingkup Badan;
- e. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
- i. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- j. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi lingkup Badan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

I.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar per Desember 2024 terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 orang dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 orang, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 63 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel. I.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	27	87,10%	44,26%	23	76,67%	37,70%
1	S3	2	6,45%	3,28%			
2	S2	12	38,71%	19,67%			
3	S1	13	41,94%	21,31%	22	73,33%	36,07%
4	D3	0	0,00%	0,00%	1		
	Bukan Perguruan Tinggi	4	12,90%	6,56%	7	23,33%	11,48%
1	SMA	4	12,90%	6,56%	7	23,33%	11,48%
Jumlah		30			31		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		61					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 pegawai (23%), golongan III sebanyak 20 pegawai (67%), dan golongan II sebanyak 3 pegawai (10%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. I.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2024

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	10	32%
	IV/c	1	3%
	IV/a	9	29%
2.	Golongan III	19	61%
	III / d	8	26%
	III / c	4	13%
	III / b	4	13%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	2	6%
	II / d	0	0%
	II / c	2	6%
	II / b	0	0%
Jumlah		31	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 30 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.33%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,67%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (36.67%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 10 pegawai (33.33%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel. I.3.

Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2024

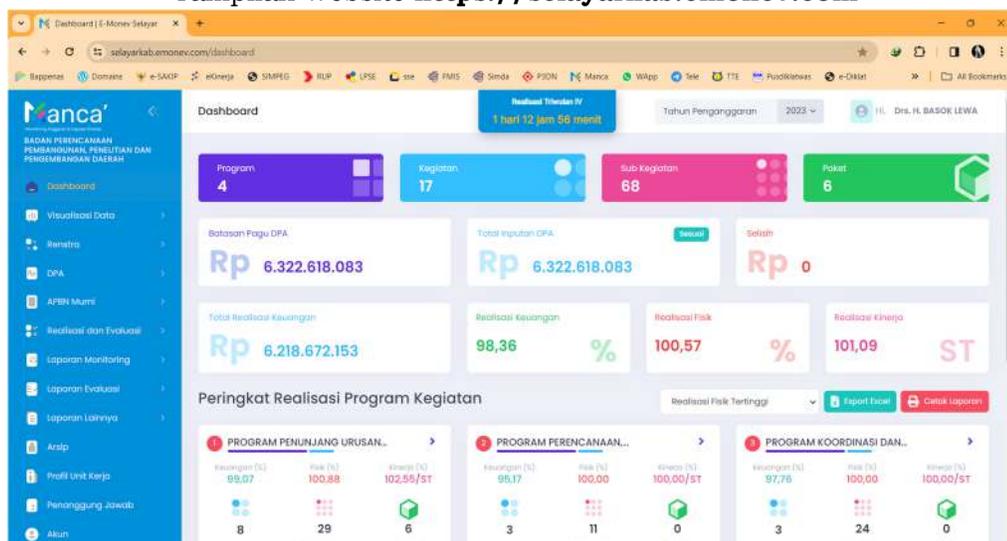
No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,23%
2	Eselon III	5	16,13%
3	Eselon IV	3	9,68%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	35,48%
5	Jabatan Fungsional Umum	11	35,48%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

I.5. Inovasi

Perkembangan sistem informasi dan teknologi menuntut Pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, mudah di akses dan berbiaya murah, untuk itu pada tahun 2024 Bappelitbangda Kepulauan Selayar membuat inovasi sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu, yang berisi database program kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi kinerja dan keuangan per tahun anggaran perencanaan, data tersebut direkap dalam bentuk website sehingga dapat dengan mudah di akses oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah menyediakan data capaian realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran yang dapat akses secara internal di lingkungan OPD terkait.

Gambar 1.2
Tampilan Website <https://selayarkab.emonev.com>



Manfaat integrasi dari aplikasi monitoring dan evaluasi antara lain : 1) organisasi dapat meningkatkan efektivitas, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan, 2) Memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis, 3) Memberikan informasi dasar untuk evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran.

I.6. Penghargaan

Pada tahun 2024, Bappelitbangda Kepulauan Selayar meraih Juara Harapan 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi Pembangunan. Penghargaan diberikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025", pada tanggal 30 April 2024 bertempat di Sandeq Ballroom Claro Hotel Makassar.

Pada tahun yang sama, Bappelitbangda Kepulauan Selayar juga meraih Penghargaan dengan predikat kinerja terbaik peringkat 1 (satu) pada acara Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2024, penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah atau individu yang berhasil menunjukkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan.

I.7. Realisasi Keuangan

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai, dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah APBD perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.6.322.618.083 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Target belanja Bappelitbangda APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp.6.208.402.800	99,05%
1.1	Gaji Pokok PNS	Rp. 3.256.102.600	51,95%
1.2	Belanja Barang Jasa	Rp. 2.952.300.200	47,10%
2	Belanja Modal	Rp. 59.775.200	0,95%
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 55.113.900	0,88%
2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.661.300	0,07%

- A. Belanja Operasi
Belanja Operasional Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.6.208.402.800,- dan terealisasi sebesar Rp.5.985.173.559,- atau 96,40%.
- B. Belanja Modal
Belanja Modal Tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.59.775.200,- dan terealisasi sebesar Rp.57.800.000,- atau 96,7%

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan perturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indicator masing – masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK (indikator kinerja kunci) pada fungsi penunjang urusan penunjang pemerintahan (perencanaan dan keuangan) diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan dan Keuangan (Permendagri No 18 Tahun 2020)

N o	IKK Outcome	OPD Penanggung Jawab
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	BPKPD
2	Rasio PAD	BPKPD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	ITKAB
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	ITKAB
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	BPKPD
6	Opini Laporan Keuangan	BPKPD

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya sejak belakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dari 6

Indikator Kinerja Kunci Outcome Fungsi Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, khususnya indikator 1 dan 2 tidak lagi menjadi kewenangan pada Fungsi Penunjang Pemerintahan khususnya urusan Perencanaan.

2.1.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

IKK Outcome :

Konsep Definisi:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	
Rumus	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya

2.1.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan partisipasi Publik)

IKK OUTCOME

Konsep Definisi:	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	
Rumus	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda $\frac{\text{Realisasi belanja unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100$ $\frac{7.938.720}{8.000.000} \times 100 = 99,23$	Tersedia dalam laporan LKPJ Perangkat daerah yang di publish pada website perangkat daerah
Konsep Definisi:	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	
Rumus	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100$ $\frac{35}{35} \times 100 = 100$	Tersedia dalam laporan LKPJ Perangkat daerah yang di publish pada website perangkat daerah

2.2. Capaian Kinerja Indikator Komponen Otonomi Daerah

Indikator komponen otonomi daerah aspek pemerintahan perencanaan terdapat Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 100.2.6.3/4626/OTDA tanggal 23 Juni 2023 tentang instrument Tambahan EPPD Tahun 2022, pada aspek Pemerintahan Daerah fungsi Perencanaan maka data tambahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Instrumen / Data Tambahan EPPD Tahun 2024

No	Aspek Pemerintahan	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan
2	Perencanaan				
a	Jumlah Program yang mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Pepres No. 108 Tahun 2022	Program-Program yang mendukung Prioritas Nasional	RKPD Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	72 Program Prioritas	Sumber Data : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2024

Tabel. 2.3
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	1. Memperkuat stabilitas dan transformasi pelayanan publik	1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	15 Program	
2	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan	2) Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	8 Program	
3	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
4	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3) Peningkatan investasi sektor unggulan daerah	14 Program	
5	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa	9 Program	
6	6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	5) Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	19 Program	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
7	7. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	7 Program	
J U M L A H			72 Program	

Tabel 2.2 dan 2.3 diatas menunjukkan keselarasan terkait sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, adapun penjabaran keterkaitan antar indikator kinerja 72 (tujuh puluh dua) program prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah tahun 2024 terlampir.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Dasar Hukum

-

3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan

-

3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Tabel 3.1

Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)
	NIHIL				

3.4. Hambatan / Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan Penugasan

Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada tahun 2024 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam bentuk tugas pembantuan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan laporan atas penerapan tugas dan fungsi pemerintahan dalam satu tahun anggaran 2024 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif dalam pelaksanaan program/kegiatan dan telah diselenggarakan secara maksimal dengan menggunakan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku

Pencapaian beberapa target pelaksanaan atas tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda tidak terlepas dari hasil kerja keras, kreatifitas, komitmen dari seluruh pegawai baik ASN, NON ASN dan stakeholder yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian visi misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bappelitbangda, dengan harapan semoga keberhasilan senantiasa mengisi segala upaya dari kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 23 Januari 2024
KEPALA BAPPELITBANGDA

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19840104 200903 2 003

LAMP IRAN

Lampiran I

Capaian Indikator Kinerja Makro RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, per tanggal 20 Januari 2025 (sumber data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar)

Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Target Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD
			target	Realisasi	Capaian		
IPM	Indeks	71,13	69,00	71,98	95,86	70,00	102,83
Tingkat kemiskinan	%	12,27	10,00	10,79	92,68	9,25	116,65
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,98	2,20	2,05	107,32	1,90	92,68
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,67	6,50	na	na	7,50	na
PDRB Perkapita	Juta	na	55,00	na	na	60,00	na
Rasio Gini	Rasio	0,345	0,320	na	na	0,300	na

Instrumen / Data Tambahan EPPD Tahun 2024

No	Aspek Pemerintahan	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan
2	Perencanaan				
a	Jumlah Program yang mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Pepres No. 108 Tahun 2022	Program-Program yang mendukung Prioritas Nasional	RKPD Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	72 Program Prioritas	Sumber Data : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Benteng, Januari 2024
KEPALA BAPPELITBANGDA

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19840104 200903 2 003

Tabel
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	1. Memperkuat stabilitas dan transformasi pelayanan publik	1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	15 Program	
2	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan	2) Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	8 Program	
3	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
4	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3) Peningkatan investasi sektor unggulan daerah	14 Program	
5	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa 5) Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	9 Program 19 Program	
6	6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			
7	7. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	7 Program	
J U M L A H			72 Program	

Tabel diatas menunjukkan keselarasan terkait prioritas Pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, penjabaran 72 program prioritas Pembangunan daerah terhadap keterkaitan antara 6 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan 7 Prioritas Pembangunan nasional dijabarkan sebagai berikut :

Tabel Matriks keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat								
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	65,5	100	57.041.804.200	Disdikpora
				Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	78,74	100		
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	88,46	100		
		2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi	Persen	47,55	100	260.000.000	Dinsos
		3	Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	6.100.000.000	Dinsos
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	98,59	100		
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	98,99	100		
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh	Persen	100	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti					
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	47,55	100		
		4	Program penanganan bencana	Persen	100	100	620.000.000	Dinsos
		5	Program pengembangan perumahan	Persen	82,99	100	623.437.596	DPKP
			Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	100		
			Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen				
		6	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persen	48,33	49,36	565.943.000	Distan KP
		7	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persen	72,54	80,0	2.638.033.200	DP3AP2KB
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		8	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	31/1000 Penduduk	36/100.000 Penduduk	50.000.000	Dinkes
		9	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	76,3	100	111.534.676.194	Dinkes
			Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	76,4	100			
			Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	80,04	100			
			Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	54,8	100			
			Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	68,97	100			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100			
			Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	50,9	100			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100			
			Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100			

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	100		
			Persentase Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	85,56	100		
			Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Utama	Utama		
2	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	20,58	100	421.200.350	Disdag KUKM
		2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persen	18,23	100	10.000.000	Disdag KUKM
3	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	100	100	498.776.200	Kesbangpol
		2	Program pengembangan kebudayaan	Persen	100	100	151.000.000	Disparbud
		3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	0	820.638.700	Semua Kecamatan

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
4	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Persen	0,43	1	433.151.200	Semua Kecamatan
		2	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	498.776.200	Kesbangpol
5	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	9,40	10,50	224.486.000	DPK
		2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	Medali	42,50	60,00	2.489.561.300	Disdikpora
		3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Persen	37,41	20,00	50.000.000	Dinkes
2	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif								
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persen	43,24	100	1.039.255.100	Diskominfo SP
		2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100	100	4.050.000.000	Setda
				Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	97	100		
3	Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persen	23,35	92,60	1.185.907.300	BKPSDM		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	96,67	100		
		4 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	25,71	15	396.089.750	Semua Kecamatan
		5 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	96,49	97,00	2.556.229.800	Bappelitbang da
		6 Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,002	3+	5.093.465.100	Inspektorat Daerah
		7 Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	8,09	5,00	162.550.412.632	BPKPD
		8 Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Persen	90,26	98,00	565.000.000	Disdukcapil
			Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	55,69	57,00		
		9 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (SPM)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	420.642.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen	100	100		
		10 Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	0,543	0,560	89.860.200	DP3AP2KB
		11 Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Persen	26,08	100	3.484.223.500	Diskominfo SP

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		12	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Persen	100	100	1.353.586.600	Bappelitbang da
		13	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	903.000.000	Bappelitbang da
		14	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Persen	100	100	13.389.657.700	Setwan
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	Persen	100	100	753.757.400	DisPMD
3	Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/ sub sentra								
1	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	58,24	73,19	41.608.473.302	DisPUTR
				Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	Persen	0	85,00		
				Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	Persen	96,00	99,00		
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	2	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	Persen	78,72	92,00	11.664.546.419	DisPUTR
				Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	0	45,00		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			Persentase Luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	Persen	1,78	1,92		
		3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)	Persen	58,23	100	12.681.410.025	DisPUTR
		4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (SPM)	Persen	0	100	9.302.966.518	DisPUTR
		5	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persen	0,50	3,42	2.691.172.291	DPKP
		6	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	97,37	100	7.156.034.300	Distan KP
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengelolaan pelayaran	Persen	41,37	63,94	1.548.203.364	Dishub
		2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persen	25,23	30,85	1.740.500.120	Dishub
4	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa							
1	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persen	0,48	2,00	661.000.000	Disperin TK
		2	Program penempatan tenaga kerja	Persen	39,06	39,69	200.000.000	Disperin TK

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Persen	54,62	100	613.187.100	Disdag KUKM
		4	Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	26,95	27,72	193.018.300	Distan KP
		5	Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Persen	6,32	4,22	977.134.526	DPKP
		6	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)				1.226.482.600	DP3AP2KB
				BKB	Persen	14,38	0,74		
				BKR	Persen	5,74	0,61		
				BKL	Persen	6,00	0,62		
				PIK R	Persen	4,30	0,51		
				UPPKS	Persen	5,09	0,91		
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	Persen	33,33	33,33	841.640.755	DisPMD
		2	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persen	0	3,70	200.575.000	DisPMD
		3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	97,73	100	8.980.829.606	Semua Kecamatan

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
5	Peningkatan investasi sektor unggulan daerah								
1	Meningkatnya usaha perikanan	1	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	2,281	2,3	261.688.550	DPMPTSP
		2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.223,40	25.480,87	2.625.740.350	Disper
		3	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	528,66	1.139,25	1.349.192.772	Disper
		4	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100	100	1.591.693.800	Setda
		5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	241,48	261,49	984.382.312	Disper
		6	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	Persen	0,02	45,00	80.000.000	Disperin TK
2	Meningkatnya usaha pariwisata	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	5,16	6,00	1.865.000.000	Disparbud
		2	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	777,27	800,00	800.000.000	Disparbud
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	Persen	242,72	350,00		
				Tingkat huniaan akomodasi	Persen	3,97	10,00		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		3	Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Persen	0	100	5.125.150	Dishub
		4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	100	400.000.000	Disparbud
		5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100	100	55.019.100	Disdag KUKM
		6	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Persen	10,00	18,00	2.840.000.000	Disperin TK
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	12,826	67	335.173.400	DPMPPTSP
		2	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	19.679.200	DPMPPTSP
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana								
1	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran	1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Angka	1,76	1,59	970.898.500	DLH

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
	serta meningkatnya mitigasi lingkungan	2	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	1,40	1,58	942.569.900	DLH
		3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	Persen	60,00	66,00	119.132.400	DLH
		4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	Persen	0	100	51.251.500	Dis PUTR
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	5	Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	1.097.993.000	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	87,30	100		
		6	Program pengelolaan persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	Persen	0,71	1,3	1.464.629.000	DLH
3	Meningkatnya Pemenuhan	7	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	92,68	100	232.338.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
	Kebutuhan Dasar Masyarakat		dan penyelamatan non kebakaran (SPM)					
			Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	Menit	7,58	6,00		

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024